



Peran Dan Tanggung Jawab Bendahara Umum Di Dinas Koperasi Dan UMKM Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Keuangan Administrasi

The Role and Responsibilities of the General Treasurer at the North Sumatra Cooperative and UMKM Service in Administrative Financial Management

**Tengku Darmansyah¹, Raja Nazira Tasya Fadhillah², Shahnaz Alissa Siregar³,
Tiara Indah Lestari Pane⁴, Irwansyah Siagian⁵**

UIN Sumatera Utara

Email: tengkudarmansyah@uinsu.ac.id¹, rajanajir8@gmail.com², shahnaz.alissa17@gmail.com³,
Indahlestari0@gmail.com⁴, irwansyah003@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 17-06-2025

Revised : 18-06-2025

Accepted : 20-06-2025

Published : 22-06-2025

Abstract

Management of financial administration in local government agencies requires accountable, transparent, and efficient governance. This study aims to examine in depth the role and responsibilities of the expenditure treasurer at the Cooperatives and UMKM Office of North Sumatra Province in the process of managing financial administration, especially in the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The method used is a descriptive qualitative approach with in-depth interview techniques with key informants who serve as expenditure treasurers. The results of the study indicate that the treasurer has the main responsibility in managing the process of disbursing funds through the Reserve Money (UP) and Direct Payment (LS) mechanisms, as well as ensuring completeness of documents and compliance with regulations. In addition, the treasurer acts as a financial document examiner, financial team coordinator, and monthly financial reporter to the Regional Finance and Asset Agency (BKAD). The use of the SIPD (Regional Government Information System) application is an important instrument in reporting and integrating data. The main challenges in carrying out tasks include technical constraints of digital systems, delays in third-party documents, and high accountability demands. The principles of professionalism, punctuality, and proactive attitudes are the main foundations in carrying out this strategic role. This finding reinforces the importance of the role of the treasurer as a central actor in ensuring orderly, accurate, and good governance-based regional financial management.

Keywords: *General Treasurer, Cooperative and UMKM Service, Administrative Financial Management*

Abstrak

Pengelolaan administrasi keuangan di instansi pemerintah daerah menuntut tata kelola yang akuntabel, transparan, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dalam proses pengelolaan administrasi keuangan, khususnya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan kunci yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola proses pencairan dana melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS), serta memastikan kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, bendahara berperan sebagai penguji dokumen keuangan, koordinator tim keuangan, dan pelapor keuangan bulanan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) menjadi instrumen penting



dalam pelaporan dan integrasi data. Tantangan utama dalam pelaksanaan tugas meliputi kendala teknis sistem digital, keterlambatan dokumen pihak ketiga, serta tuntutan akuntabilitas yang tinggi. Prinsip profesionalisme, ketepatan waktu, dan sikap proaktif menjadi landasan utama dalam menjalankan peran strategis ini. Temuan ini memperkuat pentingnya peran bendahara sebagai aktor sentral dalam menjamin tata kelola keuangan daerah yang tertib, akurat, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Kata kunci : Bendahara Umum, Dinas Koperasi Dan UMKM, Pengelolaan Keuangan Administrasi

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan administrasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan Dinas Koperasi dan UMKM. Keuangan yang dikelola secara efektif dan efisien akan memperkuat akuntabilitas serta transparansi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab instansi tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan administrasi memerlukan tata kelola yang baik dan sistematis.

Dinas Koperasi dan UMKM sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan sektor koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, memerlukan struktur pengelolaan keuangan yang mendukung fungsi pelayanan publik. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Peran pendahara umum menjadi sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan administrasi di Dinas Koperasi dan UMKM. Pendahara umum bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan, serta melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, posisi ini menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kelancaran proses administrasi keuangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi, pendahara umum juga dituntut untuk menguasai kompetensi teknis dan administratif yang memadai. Hal ini penting agar pengolahan keuangan administrasi dapat berjalan optimal, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana di sektor koperasi dan UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran dalam pengelolaan administrasi keuangan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan pengalaman kerja bendahara secara natural, sesuai konteks, serta memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan seorang narasumber kunci, yaitu bendahara pengeluaran. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pedoman pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan indikator peran, tugas pokok, tanggung jawab, tantangan, dan prinsip kerja bendahara pengeluaran sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan negara.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan wawancara bersama ibu T. Salmira Aziza, S.E dapat kita temukan informasi bahwasannya Bendahara pengeluaran memiliki peran sentral dalam pengelolaan administrasi keuangan instansi pemerintahan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, bendahara tidak hanya bertugas mencatat dan melaporkan transaksi keuangan, tetapi juga bertanggung jawab atas akurasi, legalitas, serta keteraturan pelaksanaan anggaran daerah. Narasumber menyatakan bahwa “secara umum tugas bendahara mencakup penerimaan, penyimpanan, pengelolaan atau penatausahaan serta pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan APBD ataupun APBN di dinas masing-masing.” Tugas ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjamin efektivitas belanja negara. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Fitriyani dan Sunarto bahwa peran bendahara dalam penatausahaan harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian dalam setiap tahapan administrasi (Fitriyani & Sunarto, 2021). Dalam praktiknya, bendahara harus memastikan bahwa semua dokumen pendukung telah lengkap dan sesuai, mulai dari kontrak kerja sama, surat perintah membayar (SPM), hingga bukti pembayaran.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi alat utama dalam pelaporan dan pencatatan keuangan yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Namun, narasumber menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, penggunaan SIPD sering mengalami kendala teknis seperti kelambatan sistem, yang pada akhirnya menghambat proses pembayaran. Menurut Rizki dan Pramudito, digitalisasi sistem keuangan daerah memang membawa efisiensi, tetapi tetap memerlukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang adaptif (Rizki & Pramudito, 2022).

Kolaborasi antara bendahara dan unit kerja lain seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Kepala Subbagian Keuangan menjadi bagian penting dari pengendalian internal. Bentuk pengawasan ini penting untuk menjaga integritas pengelolaan dana publik. Penelitian oleh Nurhayati dan Meiranto juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dapat meminimalkan kesalahan dan potensi penyalahgunaan keuangan di sektor publik (Nurhayati & Meiranto, 2020).

Dalam konteks peraturan, narasumber menyebutkan bahwa setiap kebijakan dan langkah bendahara telah diatur dalam peraturan gubernur yang menjabarkan fungsi dan tanggung jawab keuangan, termasuk ketepatan waktu pelaporan, penyimpanan dokumen, serta kewajiban penyetoran pajak secara tepat. Ketaatan terhadap regulasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik atau good governance, seperti yang ditegaskan dalam penelitian oleh Taufiqurrahman bahwa kinerja pengelolaan keuangan yang disiplin dan sesuai aturan berdampak positif pada kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Taufiqurrahman, 2021).

Narasumber juga menekankan pentingnya proaktivitas dalam menjalankan tugas, seperti memastikan dokumen dari pihak ketiga segera dilengkapi dan mendorong pencairan anggaran sesuai jadwal. Ia mengatakan, “Kalau sudah memenuhi persyaratan semua, segera dicairkan. Kalau pihak ketiga lambat, kita yang menjemput bola.” Sikap ini menunjukkan bahwa peran bendahara



bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam menjamin efisiensi pelaksanaan program instansi.

Selain menjalankan fungsi administratif, bendahara pengeluaran juga dituntut untuk memiliki kemampuan analitis dalam mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dokumen atau ketidakefisienan penggunaan anggaran. Dalam beberapa kasus, bendahara harus mampu memberikan rekomendasi kepada pejabat teknis atau pimpinan unit kerja terkait koreksi anggaran atau realokasi dana untuk optimalisasi kegiatan. Hal ini memperkuat peran bendahara sebagai bagian dari pengambilan keputusan keuangan yang bersifat strategis, bukan hanya sebagai pelaksana teknis semata.

Dalam pelaksanaan tugasnya, bendahara juga harus memastikan bahwa pencairan dana dilakukan berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas program kerja. Hal ini mencerminkan pentingnya perencanaan keuangan yang matang dan terintegrasi antara perencanaan kegiatan dan pengelolaan dana. Ketidaktepatan dalam pengelolaan jadwal pencairan dapat berisiko terhadap keterlambatan pelaksanaan program atau bahkan sisa anggaran yang tidak termanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, komunikasi aktif dengan unit perencanaan dan pelaksana kegiatan sangat diperlukan.

Peran bendahara dalam pelaporan juga menjadi kunci dalam menjamin transparansi publik. Laporan realisasi anggaran yang disusun secara bulanan tidak hanya berguna sebagai bahan evaluasi internal, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana APBD. Dalam konteks ini, kemampuan menggunakan aplikasi pelaporan digital seperti SIPD harus didukung oleh pelatihan yang berkelanjutan agar tidak terjadi kesalahan teknis dalam input data atau keterlambatan pengunggahan laporan yang berdampak pada penilaian kinerja instansi.

Adapun salah satu tantangan yang paling sering dihadapi oleh bendahara adalah keterbatasan sumber daya manusia pendukung, terutama di level administrasi teknis. Keterlambatan dalam penyediaan dokumen dari PPTK atau mitra kerja dapat mengganggu kelancaran proses pencairan. Oleh karena itu, penting adanya sinergi kerja dan pembagian tugas yang jelas antarunit untuk mendukung kelancaran sistem kerja yang efisien. Selain itu, pelaksanaan monitoring internal secara berkala juga dapat membantu meminimalisir hambatan ini.

Terakhir, profesionalisme dan integritas bendahara merupakan fondasi utama dalam menjalankan fungsi ini. Dalam wawancara, narasumber menyampaikan bahwa menjaga kepercayaan pimpinan dan institusi merupakan prioritas utama dalam menjalankan tugas, yang berarti tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menjunjung tinggi etika kerja dan tanggung jawab moral terhadap pengelolaan dana publik. Dengan demikian, bendahara pengeluaran memainkan peran sebagai penjaga akuntabilitas dan katalisator efisiensi dalam tata kelola keuangan di sektor publik.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kinerja bendahara pengeluaran yang profesional, transparan, dan taat pada regulasi. Meskipun masih ada tantangan teknis, seperti gangguan aplikasi digital atau keterlambatan dokumen dari rekanan, prinsip kehati-hatian, kerja sama lintas fungsi, serta disiplin pelaporan menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas administrasi keuangan di lingkungan pemerintahan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, dapat disimpulkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada pencatatan dan pembayaran, tetapi juga mencakup pengujian dokumen, koordinasi dengan pejabat teknis, serta pelaporan berkala melalui sistem digital seperti SIPD.

Bendahara dituntut untuk cermat, disiplin, dan patuh terhadap regulasi, karena setiap kesalahan administrasi dapat berdampak pada keseimbangan anggaran dan evaluasi kinerja keuangan instansi. Meskipun menghadapi tantangan teknis seperti gangguan aplikasi dan keterlambatan dari pihak ketiga, bendahara dituntut untuk bersikap proaktif dan solutif dalam menyelesaikan hambatan tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM sangat ditentukan oleh profesionalisme, integritas, dan kepatuhan bendahara pengeluaran terhadap aturan serta prinsip tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyani, A., & Sunarto. (2021). "Peran Bendahara dalam Penatausahaan Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), 22–34.
- Nurhayati, D., & Meiranto, W. (2020). "Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(1), 13–24.
- Putra, A. H., & Nugroho, T. (2019). "Peran Bendahara Umum dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 23-34.
- Rahmawati, F. (2021). "Tanggung Jawab Bendahara Umum dalam Administrasi Keuangan di Instansi Pemerintah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 78-89.
- Rizki, L. P., & Pramudito, A. (2022). "Evaluasi Efektivitas SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 4(1), 45–58.
- Sari, D. P., & Wulandari, R. (2020). "Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145-156.
- Taufiqurrahman, T. (2021). "Good Governance dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 107–118.